

**PERJUANGAN DIPLOMASI DALAM MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA MASA REVOLUSI
(1946-1949)**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh :

**ALFIDATU PANJI BIMANTARA
07406244001**

**PRODI STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK
PERJUANGAN DIPLOMASI MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA MASA REVOLUSI(1946-1949)

Oleh: Alfidatu Panji Bimantara
NIM: 07406244001

Penulisan skripsi ini membahas permasalahan tentang suatu proses perundingan yang dilakukan yang terjadi antara tahun 1946-1949. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang dipilihnya diplomasi. Selain itu untuk mengetahui proses proses dan perkembangan perjuangan diplomasi dengan dampaknya bagi Indonesia setelah masa Kemerdekaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode penelitian sejarah mencakup 4 tahap yaitu: Pengumpulan Sumber (Heuristik) yaitu kegiatan menghimpun jejak masa lalu yang digunakan sebagai sumber sejarah, Kritik Sumber (Verifikasi) yaitu kegiatan meneliti jejak masa lampau tersebut baik bentuk maupun isinya, Analisis Sumber (Interpretasi) yaitu kegiatan untuk menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Penulis melakukan perbandingan dari setiap isi buku yang diperoleh dan Penulisan (Historiografi) yaitu menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. Pendekatan yang digunakan ada 2 macam yaitu pendekatan historis dan pendekatan politik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulisan skripsi ini berhasil mengungkap beberapa hal seperti Diplomasi Indonesia efektif karena adanya keterlibatan pihak ketiga baik itu Amerika Serikat, PBB dan Dunia Internasional. Keterlibatan pihak ketiga ini memperkuat posisi Indonesia dengan memberikan pengakuan secara de facto dan de jure hingga kemudian sampailah ke perundingan akhir Konfrensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag Belanda.

Kata Kunci :Diplomasi, Indonesia, Belanda.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah hampir 350 tahun hidup sebagai negara terjajah. Kemerdekaan merupakan kebebasan dan pernyataan berdirinya negara Republik Indonesia. Negara yang bebas dari segala penjajahan bangsa asing yang menguasai seluruh kepulauan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia disambut dengan suka cita oleh seluruh rakyat Indonesia. Kegembiraan tersebut ditunjukkan dalam karangan P.R.S. Mani berjudul *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*, dikatakan bahwa :

Di Jawa, pusat kebangkitan nasional, perasaan ini lebih kuat. Bendera-bendera dan panji-panji berkibar di setiap tempat yang tinggi dan tentara maupun kelompok liar bersenjata berjalan hilir mudik dengan riangnya, menyanggah senjata mereka yang beraneka macam. Patroli sering diadakan di setiap sudut jalan, semua jalan, dan jalan raya. Begitu pula rintangan jalan diletakkan di sana sini untuk mengintai musuh-musuh republik, yaitu bangsa Belanda yang mungkin saja kembali untuk kembali berkuasa di Indonesia.¹ Salah satu konflik tersebut yakni terjadinya pertempuran antara Indonesia dan Jepang sepanjang bulan September 1945 setelah satu bulan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pertempuran yang terjadi tidak hanya melawan Jepang, tetapi juga melawan

¹ P.R.S. Mani, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta: Grafiti, 1989, hlm.90

Sekutu, Inggris, NICA (Netherlands Indies Civil Administration), dan Belanda.

Pertempuran terjadi karena TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berusaha menguasai gedung-gedung yang digunakan pemerintahan Jepang. TKR juga berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Pertempuran tersebut terjadi di Bandung, Garut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Pertempuran terjadi pada tanggal 29 September 1945 hingga pada tanggal 19 Desember 1948. Konflik yang terjadi antara Indonesia-Belanda karena masalah peralihan kekuasaan. Peralihan dari tangan Pemerintahan Belanda ke tangan Pemerintahan Republik Indonesia. Konflik tersebut terjadi dari tahun 1946-1949. Konflik yang dipicu keberpihakan Sekutu kepada Pemerintahan Belanda. Sekutu enggan menyerahkann wilayah Indonesia kepada Pemerintahan Republik Indonesia. Sekutu lebih memilih menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Hal itu yang menimbulkan terjadinya Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Kedua agresi ini terjadi di sela-sela berlangsungnya perjanjian antara Indonesia dan Belanda. D. Sidik Saputra dalam karangannya berjudul Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional, mengatakan bahwa:

Menjelang akhir tahun 1945, sebelum perundingan awal dimulai antara Indonesia dan Belanda, kebanyakan kantor-kantor Pemerintahan Republik demi keselamatan telah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada bulan Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden sendiri pindah ke

Yogyakarta, sedangkan Syahrir sebagai Perdana Menteri tetap tinggal di Jakarta. Dengan adanya perpindahan tersebut Van Mook merasa khawatir bahwa perubahan lokasi di antara pimpinan Republik akan berpengaruh atas jalannya perundingan yang dimulai pada tanggal 13 Maret 1946 di Jakarta yang juga dihadiri oleh Sir Archibald Clark Kerr tidak dapat berjalan lancar.² Pemerintah Indonesia menyadari bahwa konflik yang terjadi harus dihentikan. Penderitaan rakyat dan kehancuran akibat perang harus dipulihkan kembali. Sebagai bukti nyata tindakan dari pemerintah Republik Indonesia yaitu dengan mengadakan perundingan dengan pihak Belanda.

Dalam buku karangan George Mc Turman Kahin yang berjudul *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, dikatakan bahwa pertempuran di Surabaya memungkinkan diadakannya perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan awal 1947 antara Belanda dan Indonesia. Mulai saat itulah Pemerintah Republik Indonesia berusaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi, sejauh mungkin menghindari pertempuran fisik. Beberapa bulan terakhir sebelum penarikan pasukan Inggris pada akhir 1949 yaitu pada saat perjanjian Linggarjati, merupakan suatu kondisi yang relatif damai di Indonesia. Kondisi damai tidak berlangsung lama, perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang merupakan periode gencatan

² D. Sidik Suraputra, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*. Jakarta. UI-Press, 1991, hlm. 56

senjata berakhir dengan sia-sia. Belanda kembali mengadakan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948.³

Melihat situasi konflik yang terjadi selama periode 1945-1949 yang terus saja terjadi pemerintah Indonesia berkesimpulan bahwa konflik harus dapat diselesaikan melalui jalan diplomasi. Persetujuan gencatan senjata ini membawa dampak cukup luas terhadap sistem pertahanan Indonesia. Pemimpin Republik Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifudin sepakat bahwa perjuangan dengan cara diplomasi merupakan suatu cara perjuangan yang elegan dan bermartabat dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Diplomasi yang dilakukan bagi Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian pada masa peralihan kekuasaan. Selain itu, perjuangan dengan diplomasi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan internasional bagi eksistensi bangsa Indonesia. Dengan adanya kestabilan politik dalam negeri akan memperlancar tugas pemimpin bangsa untuk mengadakan pembinaan kembali demokrasi di Republik Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perjuangan diplomasi pemimpin bangsa berdampak besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun tahun 1946-1949. Pada masa itu perjuangan bangsa Indonesia dengan cara damai lewat perundingan dalam melawan kekuasaan penjajah Belanda.

³ George Mc Turnan Kahin;Nin Bakdi Soemanto. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1995

a. Rumusan Masalah

Diplomasi merupakan suatu cara yang dilakukan pemimpin bangsa Indonesia dalam memperoleh dukungan dunia internasional. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan diplomasi yang dijalankan bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan penuh agar terciptanya perdamaian di Indonesia. Untuk itu skripsi yang berjudul Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Masa Revolusi (1946-1949), dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa pemerintah menempuh jalur diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949?
2. Bagaimana proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun waktu tahun 1946-1949?
3. Bagaimana efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949?

b. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang digunakan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949.

- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949.
- c. Untuk mengetahui efektivitas diplomasi yang dijalankan para pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun 1946-1949.

d. Manfaat Penelitian

- a. Secara umum penelitian sejarah tentang diplomasi diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang sangat penting bagi pengembangan pengetahuan tentang fakta-fakta peristiwa sejarah awal-awal Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Membantu memberikan gambaran dampak perjuangan diplomasi yang dijalankan pemimpin bangsa Indonesia kurun waktu 1946 – 1949 suatu tulisan ilmiah. Penulis berharap bermanfaat bagi pembaca untuk penelitian lebih lanjut

c. Kajian Pustaka

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan berupa buku-buku yang tersedia di perpustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan para pemimpin bangsa kurun waktu 1946- 1949. Dalam hal ini sumber-sumber dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah

kesaksian dari seorang saksi sejarah yang dengan mata kepala sendiri melihat dan mengalami, adapun sumber sekunder tersebut adalah :

- I. Pertama, *Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI*, oleh Muhammad Roem, 1989, diterbitkan oleh PT Gramedia, Jakarta, 1989. Buku ini berisi tentang kegiatan diplomasi ditahun-tahun awal kemerdekaan RI. Diplomasi yang merupakan salah satu cara pilihan utama para pemimpin Indonesia. Diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Cara diplomasi diperjuangkan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi isi buku ini ternyata belum menunjuk pada cara yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Isi buku ini masih menampilkan suatu cara yang menimbulkan perjuangan fisik selama jalannya diplomasi. Perjuangan fisik yang melibatkan seluruh rakyat baik di desa maupun di kota-kota. Jadi, diplomasi yang dijalankan belum menunjuk ke arah yang lebih baik tanpa menimbulkan konflik.
- II. Kedua, *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*, oleh O.R.S Mani, diterbitkan oleh PT Grafiti, Jakarta, 1989. Buku ini berisi tentang kesaksian Mani dalam periode sejarah bangsa Indonesia selama kurun 1945-1950. Buku ini mengisahkan jalannya revolusi fisik yang penuh dengan insiden-insiden yang terjadi selama masa pemerintahan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Pemikiran merekalah yang mempunyai pengaruh besar dalam revolusi. Dalam buku ini, masih banyak menampilkan revolusi dengan jalan kekerasan.

- III. Ketiga, *Kilas Balik Revolusi Kenangan Pelaku dan Saksi*, oleh Aboe Bakar Loebis, diterbitkan oleh UI-Press, Jakarta, 1992. Buku ini berisi tentang berbagai pengalaman para tokoh sejarah yang terlibat langsung dalam perjuangan diplomasi yang berperan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia.
- IV. Keempat, *Refleksi pergumulan lahirnya Republik Nasionalisme Dan Revolusi di Indonesia*, oleh George Mc Turnan Kahin, Sinar Harapan & UI-Press, Cornell UI-Press, 1995. Buku ini berisi perihal besarnya kesadaran politik yang berkembang dalam semangat revolusioner yang dimiliki oleh masyarakat yang berjuang untuk menciptakan negara merdeka lepas dari kekuasaan penjajah. bagai konflik yang terjadi pada kurun waktu 1946-1949.
- V. Kelima, *Politik Bebas Aktif Tantangan dan kesempatan*, oleh M. Sabir, diterbitkan oleh CV Haji Masagung, Jakarta, 1987. Buku ini berisi tentang pelaksanaan politik bebas aktif yang dijalankan oleh para pemimpin Republik Indonesia dalam perjuangan diplomasi. Buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai masalah peralihan, cara menghentikan perang, menghadapi tantangan, dan ancaman dalam hubungannya dengan perjanjian Linggarjati dan Renville. Keputusan untuk memengaruhi pemerintah Republik Indonesia agar keputusan-keputusannya menguntungkan golongannya sendiri.⁴ Terhadap pemerintah Indonesia untuk menentukan keputusan-keputusan dalam berkompromi

⁴Miriam Budiarjo. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta Sinar Harapan, 1984, hlm.40

secara terorganisasi untuk melawan pengaruh penjajah. Diplomasi yang dapat menguntungkan pihak Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

d. Historiografi yang Relevan

Historiografi adalah metode dalam proses rekonstruksi masa lalu atas dasar data-data yang diperoleh. Menurut Louis Gottschalk historiografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses menguji masa lalu.⁵ Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi dari adanya historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian (orisinalitas) sebuah karya ilmiah. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan orisinalitas sebuah karya ilmiah.⁶

Adapun Historiografi relevan pembandingan pertama dalam skripsi ini adalah Peranan Sutan Syahrir Dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947) dalam skripsi karya Bernarda Prihartanti, S.Pd. adalah Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2010. Dalam skripsi ini lebih banyak menyoroti tentang diplomasi masa revolusi akan tetapi lebih kepada ketokohan Sutan Syahrir dalam jalan diplomasi menghadapi Belanda.

⁵Huginodan P.K. Poerwantara, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: UI Press, 199. hlm. 35

⁶Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi UNY, 2006. hlm

Historiografi yang kedua adalah dari Anton Giri Sadewo Alumni mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012. Judul Skripsi tersebut adalah “Strategi Republik Indonesia Mendapat Pengakuan Internasional Pada Masa Kabinet Hatta 1 Tahun 1948-1949”. Karya tersebut berbeda dengan skripsi yang akan disusun ini karena dalam karya Anton Giri hanya mencakup dalam masa kabinet Hatta saja bukan tentang diplomasi yang dijalankan seperti yang akan disusun dalam skripsi ini.

e. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam merekonstruksi penelitian berjudul “Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Masa Revolusi (1946-1949)”, dampak ini menggunakan metode sejarah. Penelitian sejarah yang dilakukan dalam tulisan ini menggunakan empat tahap yaitu: pengumpulan sumber (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), analisis sumber (Interprestasi) dan penulisan (Historiografi). Empat tahap digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Keempat tahapan di atas mempunyai pengertian dan maksud sebagai berikut :

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber dalam merekonstruksi tulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi berdasarkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Buku-buku dipilih dan dipilah melalui proses pencarian dan pengumpulan disesuaikan atau yang berkaitan dengan tulisan ini. Sebagai

contoh buku-buku tentang perjanjian-perjanjian diplomasi yang dilakukan pemimpin bangsa. Tentunya yang berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan pemimpin bangsa era 1946 - 1949. Salah satu contohnya Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI, oleh Muhammad Roem.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya yang wajib dilakukan adalah kritik sumber. Kritik sumber yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah kritik terhadap sumber-sumber yang sudah diperoleh. Misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan diplomasi. Ada dua kritik sumber yang digunakan dalam penelitian yakni, kritik ekstern dan kritik intern. Adapun maksud dari kritik ekstern adalah suatu pembuktian atas keaslian terhadap sumber yang didapatkan, yang jelas esensialnya. Ekstern adalah penerkaan mengenai tanggal dokumendari identifikasi pengarangnya.⁷

Kritik intern adalah suatu kepercayaan atas keaslian isi sumber yang digunakan karena tidak kredibel. Kredibel dalam arti khusus yakni: selaras dengan hasil investigasi kritis terhadap sumber-sumber.⁸ Sebagai contohnya bahwa dalam buku karangan A.B. Lopian & P.J.Drooglever berjudul Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah, dikatakan perundingan awal yang dilakukan Indonesia dan Belanda dilaksanakan pada tanggal 14 April 1946 hal ini ternyata benar karena dalam buku yang sejenis karangan G. Moedjanto berjudul “Indonesia Abad ke 20 Dari kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati”, juga

⁷ Louis Gottschalk. *op. cit.* hlm. 94

⁸ *Ibid*, hlm. 95

mengatakan tanggal dan bulan yang sama sehingga ide yang dituangkan bersifat objektif. Dengan demikian buku-buku yang sudah melalui kritik sumber dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang diplomasi.

c. Analisis Sumber (Interpretasi)

Tahap ketiga yang dilakukan dalam penulisan ini adalah analisis sumber. Analisis digunakan untuk meneliti isi buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian dalam diplomasi. Buku yang didapatkan dari perpustakaan. Diplomasi merupakan suatu politik negara yang dilakukan untuk mencari dukungan internasional. Diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, hasil diplomasi tersebut adalah pengakuan atas kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure peristiwa ini secara resminya diperoleh pada tahun 1949 pada sebuah perundingan KMB di Den Haag.

d. Penulisan (Historiografi)

Penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah. Tahap ini memberikan gambaran dalam penyusunan hasil penelitian mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan ini ada beberapa aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yakni; aspek kronologis, sistematika, sentralisasi, dan gaya bahasa. Penulis berharap akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui perkembangan diplomasi selama periode 1946-1949.

2. Pendekatan

Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan sosial dan pendekatan politik: Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui dalam kurun waktu ini daya upaya Bangsa Indonesia masih ditujukan bagi Mempertahankan Negara Proklamasi Indonesia dari segala bentuk rongrongan baik yang berasal dari pihak Belanda melalui Nica maupun dari dalam negeri, sehingga UUD 1945 tidak berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan persetujuan konferensi meja bundar, bahwa agar kedaulatannya diakui Belanda maka Indonesia harus dalam bentuk RIS. Yang terdiri atas Negara proklamasi Indonesia, Negara Indonesia Timur, Sumatera Timur dll. Dengan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Politik yang dijalankan oleh para pemimpin bangsa Indonesia merupakan bagian dari efektivitas diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Muara dari diplomasi yang diinginkan pemimpin bangsa adalah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure dari dunia Internasional.

e. Sistematika

Skripsi berjudul Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Masa Revolusi (1946-1949) Ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode dan pendekatan, hipotesis, dan sistematika penulisan.

- b. Berisi uraian tentang sebab digunakannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1949 yang memuat beberapa bahasan yakni: adanya konflik yang terjadi terus menerus, situasi politik setelah kemerdekaan, dan memilih diplomasi sebagai jalan penyelesaian konflik.
- c. Berisi uraian tentang proses jalannya diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembahasan meliputi latar belakang proses jalannya diplomasi dan berbagai macam perundingan.
- d. Berisi uraian tentang efektivitas diplomasi yang dijalankan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembahasan dalam bab ini adalah peran pihak ketiga dalam diplomasi dan hasil yang dicapai dalam perundingan diplomasi.

B. Kondisi Indonesia Masa Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan diproklamasikan keadaan politik Indonesia tidak otomatis stabil. Ketidakstabilan politik karena adanya konflik yang terjadi di berbagai daerah, hal inilah yang memengaruhi situasi politik Indonesia setelah kemerdekaan. Situasi politik memburuk akibat adanya konflik dengan Belanda. Konflik terjadi akibat adanya kesadaran rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Rakyat bertekad bahwa kemerdekaan harus tetap dipertahankan apa pun akibatnya. Pada awal-awal pemerintahan Indonesia, keadaan Indonesia penuh dengan insiden pertempuran terutama terjadinya pertempuran di Surabaya dan Ambarawa. Pertempuran yang terjadi telah menyadarkan SEAC (South East Asia

Command). Komandan SEAC, Lord Mountbatten berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan bukan hanya cetusan dari segelintir orang yang dianggap berbau Jepang, tetapi merupakan dampak dari arus nasionalisme yang telah berkembang di Indonesia.⁹ Nasionalisme yang didukung oleh rakyat dan pemuda Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemuda dianggap menjadi inti pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajahan Belanda. Perjuangan yang dilakukan para pemuda merupakan bukti bahwa mereka bersedia membela tanah air Indonesia dengan ikhlas. Hal itu menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam panggung politik Republik Indonesia. Pada awalnya pemuda-pemuda Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan sepenuhnya hanya dapat dicapai dengan perjuangan bersenjata.

Pada perkembangan selanjutnya pemuda menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat dipertahankan dengan perjuangan bersenjata saja. Perjuangan juga memerlukan perundingan diplomasi. Peristiwa pertempuran di Surabaya dan Ambarawa merupakan salah satu politik yang digunakan pada pemerintahan Soekarno-Hatta untuk melawan pemerintahan Belanda. Peristiwa tersebut telah membawa hasil, pada tanggal 10 November 1945 tentara Inggris-India dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia. Inggris-India tidak dapat menguasai kota

⁹ Mani,PRS. (1989). *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.hal 35

Surabaya dan Ambarawa lagi.¹⁰ Kekalahan pasukan Inggris membawa akibat serta ancaman bagi Pemerintah Belanda atas kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Van Mook yang menyadari situasi tersebut, sistem politik Belanda di Indonesia yang harus diperbaiki. Menurutnya pertempuran Ambarawa dan Surabaya merupakan kemelut di bidang politik yang harus diatasi. Jika hal tersebut tidak bisa diatasi maka akan berakibat buruk bagi masa depan Indonesia, dalam hal kerjasama membangun bangsa. Van Mook menawarkan suatu cara untuk mengatasi kemelut politik tersebut dengan perundingan perunding dengan Belanda.

C. Pemilihan Jalan Diplomasi

a. Pihak Republik Indonesia

Pertempuran yang terjadi terus menerus setelah Indonesia merdeka akan membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan tidak dapat dirasakan. Oleh rakyat jika pemerintah tidak dalam keadaan damai. Memang tidak dapat disangkal pertempuran-pertempuran tidak dapat dihindari. Hal itu terjadi karena adanya rasa semangat nasionalisme dan kesadaran rakyat untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Sejak awal Soekarno-Hatta selalu memilih penyelesaian dengan cara damai, baik ketika menghadapi Jepang maupun Belanda. Bagi pemuda, sikap ini kadang dianggap sikap pengecut dan lemah mendorong Syahrir untuk ikut

¹⁰ Ide Anak Agung Gede Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 1995, hlm. 34.

berperan dalam pemerintahan.¹¹ Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia menyadari untuk mempertahankan kemerdekaan tidak selamanya dengan perjuangan bersenjata. Sementara itu Sutan Syahrir diperkuat dan membentuk kabinet baru tampil dalam perjuangan politik setelah membentuk kementerian nasional.

Jika perjuangan bersenjata tersebut dapat digunakan dalam persengketaan antara Indonesia-Belanda tidak akan ada penyelesaian karena kalah persenjataan. Ketika pemerintahan Presidensial diubah menjadi pemerintahan Demokrasi Parlementer. Pada masa itu kekuasaan politik dijalankan oleh Sutan Syahrir. Beliau lebih memilih perjuangan perundingan atau juga disebut politik diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan, parlementer banyak yang menentang terutama bagi golongan sosialis dan golongan kanan di dalam negeri.

b. Pihak Pemerintah Belanda

Pidato Wilhelmina, sesudah Perang Pasifik akan menjadi dasar langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Belanda untuk memulai suatu dialog dengan wakil-wakil Indonesia. Menteri jajahan seusai Perang Pasifik ketika itu, Logemann berpendapat bahwa kebijakan Belanda setelah Perang harus ditunjukkan ke pengakuan nasionalisme Indonesia. Sekalipun Logemann menyadari nasionalisme di Indonesia jauh dari matang. Berbeda dengan Van Starckenborg Stachouwer berpendapat lain, ia tetap pada pendiriannya bahwa kebijakan ketatanegaraan harus

¹¹ Dr.A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Periode Linggarjati*, Penerbit Angkasa Bandung, hlm.4

bersambung dengan masa lalu. Perubahan hanya dilakukan secara sedikit demi sedikit dengan hati-hati, dengan Belanda bersifat menentukan dan ia sangat menentang dirangsanya cita-cita politik terutama diadakannya pembicaraan dengan para pemuka Indonesia. Perbedaan mendasar dalam pendirian Logemann dan Van Starckenbrog, mengakibatkan pada tanggal 11 Oktober 1945 Van Starckenbrog mengundurkan diri.¹²

D. Dampak Perundingan Republik Indonesia

Perjuangan diplomasi bagi Indonesia merupakan suatu politik untuk mencari dukungan dan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia banyak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Ternyata perjuangan diplomasi tersebut tidak sia-sia. Diplomasi yang dilakukan dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia. Banyak negara di dunia yang kemudian memberikan dukungan dan pengakuan atas Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu wujud pengakuan dunia internasional ialah dengan ditanda tangannya perjanjian Linggarjati. Indonesia mendapat pengakuan *de facto* yang diberikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Cina. Begitu juga halnya ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua untuk menaklukkan Indonesia, Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik kepada pihak Indonesia. Amerika kemudian menghentikan pemberian dana bantuan kepada Belanda pada tanggal 22 Desember 1949. Bahkan Kongres

¹² Ide Anak Agung Gde Agung. *Renville*. Jakarta: Penerbit SinarMas, 1983, hlm.23

Amerika mendesak agar menghentikan semua bantuan ekonomi kepada Belanda. Tekanan Amerika terhadap Belanda dianggap pemimpin Republik Indonesia belumlah cukup. Para pemimpin Republik Indonesia mengharapkan tekanan Amerika yang lebih tegas lagi kepada Belanda. Dukungan Amerika terhadap Indonesia bukan hanya karena agresi militer Belanda saja.¹³ Keterlibatan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda membawa dampak positif bagi Indonesia. Perundingan diplomasi yang dijalankan telah menghasilkan kemenangan bagi Indonesia. Sebagai hasilnya, kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan. Kedaulatan bangsa Indonesia diakui dunia Internasional setelah melalui berbagai macam perundingan. Hingga sampailah yang telah dicita-citakan kemerdekaan diperkuat dengan pengakuan dunia Internasiol sehingga memperkuat nilai tawar Indonesia dalam berbagai masalah internasional yang mungkin akan dihadapi di kemudian hari. Setelah situasi politik stabil dan mendapat pengakuan dunia Internasional maka perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan dimaksudkan untuk meletakkan dasar kerjasama antara Republik Indonesia dengan Pemerintahan Belanda dikemudian hari. Kerajaan Belanda dan Indonesia.

Perundingan konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 telah memberikan kemenangan bagi Indonesia berupa penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Negara di seluruh dunia seolah-olah berlomba-

¹³ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.135

lomba mengakui Kemerdekaan Indonesia. Mulai saat itu politik luar Negeri Indonesia perlu diformulasikan lebih baik. Lebih-lebih setelah Indonesia diterima sebagai anggota dari PBB.¹⁴ Negara Internasional yang memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia kemudian adalah Rusia dan RRC. Indonesia akhirnya dimasukkan ke dalam PBB sebagai anggota ke-60 dari badan Internasional dunia itu pada tahun 1950.

Jika perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan cara diplomasi, negara Indonesia tidak dapat dipertahankan. Kepiawaian pemimpin bangsa Indonesia dalam berdiplomasi tidak lepas dari campur tangan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat. PBB mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. PBB merupakan forum yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia untuk mengusir penjajahan PBB berusaha melenyapkan ketidakadilan di dunia. PBB berusaha menciptakan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keterlibatan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda membawa dampak positif bagi Indonesia. Perundingan diplomasi yang dijalankan telah menghasilkan kemenangan bagi Indonesia. Sebagai hasilnya, kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan. Kedaulatan bangsa Indonesia diakui dunia Internasional setelah melalui berbagai macam perundingan.

¹⁴Ide Anak Agung Gde Agung(1995). *Pernyataan Rum-Van Roije (Rum-Roijen Statement 7 Mei 1994)* Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusataramadan UI-Press . hlm. 85

DAFTAR PUSTAKA

- Agung,Ide Anak Agung Gde. (1983).*Renvile*. Jakarta : Sinar Harapan.
- _____(1995).*Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*.Yogyakarta : Nusatama dan UI-Press.
- _____(1995). *Pernyataan Rum-Van Roijen (Rum-Roijen Statement 7 Mei 1994)* .Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusatama dan UI-Press.
- _____(2005).*Pengantar Ilmu Sejarah Yogyakarta*.Yogyakarta :Bentang Pustaka.
- Basri,Yanto. (2005).*Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta : Pustaka Tokoh Bangsa.
- Budiarjo,Miriam.(2005).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Jakarta : Gramedia Pustaka.
- _____(1984).*Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*.Jakarta:Sinar Harapan.
- Daliman.(2006).*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*.Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi UNY.
- Dzikir,dkk.(1989).*Eksiklopedi Nasional Indonesia*.Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.